



# **Bab I**

## **SBY dan Politik**

## **SBY, Politik Menghadang, Politik Melenggang**

Kompasiana, 12 September 2017 19:17 Diperbarui: 12 September 2017 19:22

Suasana hiruk pikuk terjadi dalam ruang sidang Gedung MPR Juli 2001, ada sekitar 700 anggota MPR sedang beradu argumen, silang pendapat mempertahankan keyakinan dan sikap politiknya. Ya, saat itu sedang berlangsung sidang istimewa yang hasil akhirnya adalah mencabut mandat Presiden Abdurahman Wahid atau Gus Dur.

Suatu transisi politik kekuasaan yang cukup menegangkan ketika Gus Dur yang baru menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia keempat harus berhenti dan diberhentikan di tengah masa jabatannya oleh sidang istimewa MPR. Maka, Megawati Soekarnoputri yang merupakan Wakil Presiden saat itu secara otomatis akan menggantikan posisi Gus Dur menjadi Presiden Republik Indonesia. Posisi wakil presiden kosong.

Di saat itulah banyak kalangan yang menghubungi SBY, mendorong dan mendukung dirinya untuk maju mencalonkan menjadi wakil presiden. Menurut pengakuan SBY dalam buku *SBY Sang Demokrat*, sejumlah anggota DPR

dari berbagai fraksi, yakni PDIP, Golkar, Utusan Golongan, dan Kesatuan Bangsa (KKB) walaupun mereka tidak mewakili fraksinya masing-masing, tetapi mereka meminta SBY untuk maju dalam pencalonan wakil presiden.

Meski awalnya SBY mengaku tidak begitu tertarik, tetapi dengan berbagai pertimbangan akhirnya SBY secara resmi pada 24 Juli 2001 oleh fraksi KKB mengajukan dirinya menjadi calon Wakil Presiden. Saat itu ada sejumlah kandidat yang ikut bertarung memperebutkan posisi orang nomor dua di Indonesia, antara lain, Hamzah Haz dari PPP, Akbar Tanjung dari PPK, Agum Gumelar dari FDU, Sisiwono Yudhohusodo dari FUG, sementara fraksi TNI/Polri tidak mengajukan calon.

Pemilihan wakil presiden yang nantinya akan mendampingi Megawati Soekarnoputri berlangsung sangat seru dan alot selama tiga putaran. Pada putaran pertama dan kedua SBY lolos dengan perolehan suara 122 dan 147. SBY tidak bisa melanjutkan putaran ketiga karena kalah suara dari Hamzah Haz dan Akbar Tanjung, yang masing-masing mengantongi 254 dan 203 suara. SBY gagal menjadi wakil presiden, kekuatan politik yang lebih besar telah menghadangnya.

Kegagalan SBY menjadi Wapres bukan satu-satunya momentum politik yang menghadang dalam perjalanan hidupnya. Beberapa tahun sebelumnya, peristiwa politik juga ditengarai menjadi faktor terbesar yang menghalangi seorang SBY untuk menjadi seorang KASAD TNI. Kegagalan menjadi orang nomor satu di TNI AD sangat memukul perasaan dan semangat SBY.

“Dalam perjalanan hidup saya, inilah berita kedua yang membuat saya terpukul sekali. Pertama, adalah ketika saya sebagai anak tunggal saya harus menghadapi realitas perceraian orang tua saya. Dan kedua, pada saat Presiden Abdurrahman Wahid meminta saya menjadi menteri. Dengan menjadi menteri, saya harus pensiun lima tahun lebih cepat dari TNI. Saya benar-benar terpukul dan sangat sedih.” (*SBY Sang Demokrat*, Usamah Hisyam, hal 19, Maret 2004).

Adalah Gus Dur, Presiden hasil Sidang Umum MPR 1999, meminta SBY menjadi Menteri Pertambangan dan Energi di Kabinet Persatuan Nasional. Ini artinya karier militer SBY berakhir. Ia tidak hanya gagal menjadi KSAD, tetapi juga harus pensiun dari dinas kemiliteran lima tahun lebih cepat.

SBY nyaris tidak mengeluarkan kata-kata, hati dan pikirannya gundah gelisah, bibirnya terkatup rapat. Guratan wajahnya yang halus berubah mengeras, dahinya mengerut, tatapan matanya kosong. Bagaimana tidak, sebagai Kepala Staf Teritorial (Kaster) TNI, SBY dua tahun terakhir menjadi motor penggerak reformasi internal TNI. Salah satu wujud implementasi reformasi TNI adalah mengembalikan profesionalisme prajurit.

Bahkan setelah Sidang Umum MPR, Menhankam/Pangab saat itu, Jenderal Wiranto memanggil SBY. Bersama Wakil Panglima TNI Laksamana Widodo AS, SBY menghadap Wiranto. “Saya akan segera meninggalkan TNI, dan

mendapatkan tugas lain Laksamana Widodo AS akan dipromosikan menjadi Panglima TNI,” kata Wiranto.

Wiranto juga menyampaikan rencana pergantian KSAD Jenderal TNI Subagyo Hadisiswoyo. “Karena Anda Letnan Jenderal yang paling siap, Anda akan saya tugaskan menjadi KSAD,” kata Wiranto kepada SBY. Sebagai prajurit profesional, SBY merasa bangga bila menjadi KSAD. Tiada kebahagiaan dan kepuasan lain bagi seorang prajurit, kecuali mengabdikan sepenuhnya di satuan hingga menjadi Kepala Staf Angkatan.

Namun, apa daya, skenario Mabes ABRI, porak poranda di tangan Gus Dur. Obsesi SBY untuk menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, terkubur dalam-dalam. Gus Dur sebagai Presiden ternyata punya pertimbangan dan pilihan lain.

Mengenang peristiwa itu, SBY mengisahkan, “Saya terkejut mendengar informasi akan menjadi Mentabes. Sebagai prajurit, saya tidak dapat menolak, dan tidak dapat berbuat apa-apa, kecuali menerima penugasan tersebut. Seluruh peluang saya untuk mengabdikan diri kepada TNI secara paripurna hingga masa pensiun hilang sepenuhnya. Saya benar-benar terpukul dan sedih karena dengan menjadi menteri berarti harus pensiun lima tahun lebih cepat. Saya tidak bisa berbuat lebih banyak untuk TNI AD dan juga TNI secara keseluruhan. Dengan berat hati, saya harus meninggalkan TNI. Inilah yang membuat saya sangat sedih.”

SBY kemudian menghubungi ayahnya di Pacitan. “Rasanya berat sekali kalau saya harus meninggalkan TNI sekarang. Saya sebenarnya tidak siap, Pak. Saya ingin mengabdikan secara paripurna di TNI,” kata SBY. “Ya diterima saja Sus. Kamu harus tulus dan ikhlas. Karena setiap pengabdian kepada bangsa dan negara, bisa dilakukan di mana saja, dan pengabdian itu sama saja,” nasihat sang ayah.

SBY pada akhirnya menerima penugasan Presiden Abdurrahman Wahid sebagai Menteri Pertambangan dan Energi. Ia tulus menerimanya, sekalipun ia sendiri tak mampu menghapus kesedihan dalam hatinya. Ia harus segera pensiun. Obsesinya untuk menjadi Kepala Staf Angkatan Darat musnah sudah. Langkah *the rising star* terganjil. Ia pensiun dengan pangkat Jenderal Bintang Tiga. Meskipun pada akhirnya mirip dengan jejak sang mertua, Sarwo Edhie Wibowo yang mendapat Jenderal Kehormatan dari Soeharto. Pada 2000, SBY dianugerahi pangkat Jenderal Kehormatan Bintang Empat oleh Gus Dur.

Namun, peristiwa demi peristiwa, perjalanan seorang SBY dalam dunia politik justru semakin meroket. Dengan ketekunan, kerja keras dan terus berbenah, melalui dukungan dan kekuatan Partai Demokrat, SBY akhirnya menjadi orang nomor satu di Republik ini dengan menjadi Presiden keenam Indonesia pada 2004. Langkahnya kian tak terbendung ketika SBY maju untuk pencalonan presiden periode kedua pada 2009. SBY menang mutlak dengan perolehan suara dukungan rakyat Indonesia lebih dari 60%. SBY, oleh politik terhadang, karena politik melenggang ke Istana.



# **Bab II**

## **SBY, Komunikasi dan Kepemimpinan**

# **Kepemimpinan SBY: Bencana Tsunami, Perdamaian Aceh, dan Kemenangan Partai Demokrat 2004 dan 2009**

26 Agustus 2013 20:03 Diperbarui: 24 Juni 2015 08:47

## **A. SBY dan Partai Demokrat**

Keberhasilan Partai Demokrat menjadi partai pemenang pada Pemilu Legislatif tahun 2004 dan 2009 tidak bisa dipisahkan dari keberhasilan dan gaya kepemimpinan sosok SBY sebagai Ketua Dewan Pembina yang sekaligus sebagai salah seorang pendirinya. Sejarah partai ini tidak bisa dipisahkan dari sosok SBY yang dari awal telah menggagas, mengusung, dan mendirikan partai dengan ideologi nasionalis-religius. Sebagai partai jalan tengah yang berpihak pada nilai-nilai partai yang tidak berhaluan kiri maupun kanan. Ideologi nasionalis-religius, hal ini bermakna sebagai kerja keras untuk kepentingan rakyat dengan landasan moral dan agama serta mempertimbangkan humanisme-pluralisme dalam mencapai tujuan perdamaian demokrasi dan kesejahteraan.



Tidak bisa dipungkiri, kemajuan partai yang baru berusia belasan tahun, pencapaian tersebut merupakan prestasi yang fenomenal. Faktor terbesarnya adalah karena figur SBY yang menjadi simbol hidup dan teladan partai. Tokoh yang muncul sebagai produk sejarah telah membawa Partai Demokrat menjadi partai besar dan sekaligus menjadikan SBY presiden dua periode melalui pilpres langsung pertama dalam sejarah perpolitikan Indonesia.

Figur SBY yang santun, cerdas, bersih, dan demokratis mampu membuat Partai Demokrat melesat hanya dalam waktu kurang dari 10 tahun menjadi partai yang besar, bahkan mampu menandingi partai-partai besar yang telah ada sejak puluhan tahun silam, yakni Partai Golkar, PDI Perjuangan, dan PPP.

Cikal bakal mengapa SBY mendirikan Partai Demokrat adalah pelajaran dari kekalahannya menjadi Wapres, bahwa untuk terjun ke politik harus menjunjung norma dan etika demokrasi. SBY tidak bisa mengandalkan anugerah atau *privilege* yang diberikan kekuasaan. Ia harus berjuang melalui partai. Yang kedua, untuk mencalonkan diri sebagai presiden atau wapres, SBY harus memiliki basis partai politik. Untuk maju dengan menggunakan partai yang sudah besar dan mapan tidaklah mudah karena mereka telah memiliki calon masing-masing. Artinya, siapa pun yang mempunyai cita-cita di masa mendatang untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan wapres, akan lebih nyaman, kalau memiliki basis partai politik sendiri. Pikiran inilah yang mendasari SBY untuk membidani kelahiran

Partai Demokrat.

Dengan mengusung jargon politik bersih, cerdas, dan santun, serta gerakan antikorupsi yang dikampanyekan selama Pemilu 2009, perolehan suara Partai Demokrat terdongkrak lebih dari dua kali lipat dibanding perolehan suara pada Pemilu 2004. Dan, SBY sebagai Ketua Dewan Pembina kembali terpilih menjadi presiden untuk periode kedua. Hanya dengan satu putaran SBY-Budiono memperoleh suara sebanyak 73.874.562 atau 60,80%.

## **B. Pasang Surut Popularitas SBY dan Partai Demokrat**

Meski pada akhirnya SBY mampu membawa suara Partai Demokrat naik hampir tiga kali lipat pada Pemilu Legislatif tahun 2009, dari 7,45% menjadi 20,85% perolehan suara dan sekaligus menjadikan dirinya presiden untuk kedua kalinya berpasangan dengan Budiono, bahkan yang terakhir merupakan kemenangan fenomenal hanya dengan satu putaran mampu meraih suara dukungan rakyat sebanyak 73.874.562 atau 60,80%.

Namun, perjalanan politik SBY dan Partai Demokrat tidak selalu mengalami jalan mulus dan mudah. Status dan kinerja SBY sebagai presiden sangat memengaruhi pasang surut partai. Menurut hasil survei dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pada September 2007 yang dirilis Suara Karya, popularitas SBY merosot tajam hingga angka 35,3%. Padahal, di awal pemerintahannya, popularitas SBY sempat mencapai angka 80%. Banyak kalangan